

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah tenaga kerja diperkotaan banyak berkaitan dengan gejala pokok dimana tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dan pembengkakan pada sektor formal yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan penghasilan pada sektor tersebut. Dengan besarnya tingkat pengangguran menjadi permasalahan yang tidak mudah di atasi oleh pemerintah. Pengangguran juga berdampak pada perekonomian dan sosial. Jika dilihat dari segi ekonomi pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, turunya kemauan dalam menabung masyarakat sehingga tingkat investasi menurun. Dan pada segi sosial pengangguran dapat menyebabkan tingkat kriminalitas, bertambahnya penduduk miskin, bertambahnya anak putus sekolah, meningkatkan keinginan untuk menjadi pengemis, anak jalanan dan tunawisma. Pengangguran bisa dimulai dari dua masalah utama, yaitu banyaknya tenaga kerja yang tersedia atau terbatasnya lapangan kerja. Dari permasalahan tersebut terdapat faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan jumlah tenaga kerja terdidik dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja terdidik yang sesuai kebutuhan lapangan kerja. Jadi jika lapangan pekerjaan tersedia namun tenaga kerja yang terdidik tidak sesuai dengan kebutuhan maka pengangguran akan tetap terjadi.

Akibat adanya pengangguran akan dampak pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk kota. Salah satu cara dalam mengentaskan permasalahan tersebut maka banyak disarankan oleh pengamat sosial ekonomi pembangunan dengan melalui pengembangan dan penciptaan lapangan kerja

pada sektor informal. Dalam beberapa kurun waktu terakhir sektor informal pada daerah perkotaan mengalami pertumbuhan yang pesat. Faktor utama dalam meningkatnya pertumbuhan sektor informal yakni karena buruknya sistem penyerapan tenaga kerja pada sektor formal, yang ditambah dengan penambahan angkatan kerja di perkotaan yang disebabkan migrasi. Pesatnya jumlah penduduk yang melakukan migrasi tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan kesempatan kerja, yang dapat menimbulkan pengangguran di kota-kota besar yang dapat memunculkan sektor informal. Sektor informal dapat menjadi suatu manifestasi dari keadaan pertumbuhan kesempatan kerja pada negara berkembang. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan satu sektor informal yang banyak terdapat di area perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru. Sektor informal ini banyak yang menjadikan sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat tertampung pada sektor formal. Sektor informal ini akan memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat hal ini dilihat saat kegiatan pemerintah yang kurang mampu dalam menyediakan lapangan kerja. Pertambahan jumlah sektor informal disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketidakmampuan sektor formal dikarenakan pertumbuhan penduduk melebihi kecapatan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi sektor informal menjadi alternatif dalam mengurangi pengangguran (Wahyono, 2017). Sektor informal menjadi alternatif bagi masyarakat karena mudah memasukinya tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Bromley (2000) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal dan merupakan solusi bagi kaum urban. Banyaknya pedagang kaki lima yang menempati trotoar di berbagai ruas jalan menjadi permasalahan bagi Pemerintahan Kota atau Daerah. Disebabkan lapangan pekerjaan yang sulit dan banyaknya pemutusan hubungan pekerjaan yang membuat banyak masyarakat yang memilih berahli profesi menjadi pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima ini dapat memberi keuntungan bagi konsumen untuk masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, karena pedagang kaki lima ini dapat menyediakan barang-barang dengan harga yang relatif murah. Hal ini sama dengan pendapat yang dijelaskan oleh Rachbini, D. J. and A. Hamid (1994) dalam (Susilo, 2011) yang menjelaskan bahwa dari dua juta buruh atau pegawai yang di Jakarta membeli makanan dari sektor informal. Meskipun kehadiran pedagang kaki lima ini dapat menimbulkan dampak yang positif tapi terkadang keberadaan mereka dianggap sebagai sumber permasalahan, khususnya di area perkotaan, hal ini terjadi karena pedagang kaki lima ini sering menggunakan ruang publik, seperti trotoar, bahu jalan, taman kota dan sebagainya bukan untuk tempat berdagang digunakan sebagai aktivitas jual beli, yang dapat berdampak negatif yaitu keberadaan pedagang kaki lima ini dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan dapat merusak keindahan kota, yang membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih ekstra, teliti dalam pengambilan kebijakan atau tindakan. Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya pedagang kaki lima ini dapat menimbulkan kemandirian dalam menjalankan usaha, dalam hal ini para pedagang kaki lima dituntut agar lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya. Hal ini yang dapat meningkatkan pendapatan mereka yang semula berpendapatan rendah menjadi

menengah atau bahkan lebih besar. Terkadang keberadaan pedagang kaki lima ini sering menimbulkan pelanggaran, di karenakan mereka sering menggelar dagangannya di ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, dan jembatan yang dapat menimbulkan persoalan dalam masalah ketertiban dan kebersihan kota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003, pedagang kaki lima yakni pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagi tempat berjualan, terkadang keberadaan mereka dapat memiliki dampak yang negatif dan positif bagi lingkungan sekitar. Permasalahan pedagang kaki lima ini merupakan salah satu permasalahan utama pada kota-kota besar di Indonesia terutama di Surabaya. Pertumbuhan pendatang dari luar Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami pertambahan dan penambahan jumlah penduduk yang datang ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang membuat permasalahan Kota Surabaya bertambah, sesuai penjelasan diatas hal ini yang akan menimbulkan pengangguran. Hal ini akan membuat sulitnya perekonomian bagi pendatang, yang membuat mereka harus memilih bekerja pada sektor informal dengan modal yang relatif kecil yang dapat menumpuh kebutuhan mereka. Salah satu sektor informal yang membutuhkan modal relatif kecil yakni menjadi pedagang kaki lima. Sebagai kota metropolitan, keberadaan PKL selalu bertambah, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini diketahui persebaran pedagang kaki lima di setiap wilayah Kota Surabaya.

Tabel 1. 1 Data Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya

No	Wilayah	2017
		Total PKL
1	Wilayah Selatan	2.195
2	Wilayah Pusat	1.423
3	Wilayah Utara	1.387
4	Wilayah Timur	1.276
5	Wilayah Barat	1.260
Total seluruh wilayah 2017		7.541
Total seluruh wilayah 2016		6.541

Sumber : Data Primer, 2017, diolah.

Berdasarkan rekapitulasi data tabel 1.1 PKL tahun 2017 yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah, dapat diketahui keberadaan pedagang kaki lima di kota Surabaya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bagian Usaha Mikro Menengah Kota Surabaya bahwa jumlah PKL dapat berubah dan selalu naik dengan pesatnya perkembangan PKL pada Kota Surabaya yang tersebar di 31 Kecamatan. Dengan keberadaan PKL ini dapat membuat perekonomian kaum urban atau masyarakat yang tidak dapat tertampung pada sektor formal.

Usaha mikro memiliki peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Usaha mikro seperti pedagang kaki lima merupakan salah satu indikator utama dalam penyediaan tenaga kerja lokal yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian kota Surabaya. Usaha mikro yang mendapatkan perhatian dari pemerintah merupakan jenis usaha makanan dan minuman memiliki pendapatan relatif lebih tinggi dari pada jenis usaha lainnya. Hal ini karena produk makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok manusia, jadi meskipun disaat harga mengalami kenaikan, produk makanan masih banyak dinanti dan dibutuhkan banyak orang.

Jenis usaha ini termasuk dalam usaha yang mudah pengelolaannya dan tidak memerlukan skill yang tinggi; penggunaan modal relatif kecil dengan perputaran yang cepat; relatif menjanjikan keuntungan yang besar. Pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman kebanyakan yang berlokasi di trotoar Kota Surabaya. Menurut Utami (2013), jenis usaha pedagang kaki lima yang potensial untuk dikembangkan dengan memperhatikan prospek dan tingkat kontribusi terhadap pendapatan adalah jenis usaha makanan dan minuman. Dikarenakan jenis usaha ini mudah pengelolaannya dan tidak memerlukan skill yang tinggi, penggunaan modal relatif kecil dengan perputaran yang cepat, relatif menjanjikan keuntungan yang besar.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Hariningsih, E dan Simatupang, (2008) menjelaskan bahwa meningkatnya pendapatan seorang pedagang tidak hanya memerlukan modal dalam menjalankan usahanya, terdapat faktor lain yang diperlukan. Faktor lain yang penting dalam menjalankan usaha adalah lama pendidikan, modal usaha, harga sewa kios, jarak, lama berdagang, dan jumlah konsumen. Kita ketahui bahwa jika seseorang memiliki lama pendidikan yang tinggi akan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan yang diterima pedagang kaki lima. Dengan tingginya lama pendidikan kemungkinan akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil keputusan dalam berbisnis yang akan memiliki dampak pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan jika ia memiliki lama pendidikan yang rendah. Menurut Susilo, (2011), pedagang kaki lima merupakan pedagang yang memiliki modal dan omset yang kecil dengan latar belakang pendidikan yang rendah yang membuat pedagang cenderung menempati ruang publik dalam kegiatan berdagang Sasmita, Berchman Prana, Gunawan Sudarmanto dan Tedi Rusman (2013) dan Lamba, Arung (2011)

menjelaskan adanya pengaruh positif signifikan pada modal usaha yang dikeluarkan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Hasil penelitian Wicaksono (2011) menjelaskan bahwa faktor modal dan jarak tempuh seringkali memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu usaha dagang, dimana dapat berdampak pada timbulnya permasalahan lain. Yang terkadang modal usaha ini hanya dapat membuka usaha dagangnya tanpa bisa memaksimalkan skala usaha.

Disamping itu dengan banyaknya jumlah PKL setiap tahunnya, upaya Wali Kota Surabaya dalam memberikan tempat pada pedagang kaki lima selalu dilakukan agar pedagang lebih tertata dan keindahan kota tetap terjaga, dengan komitmen Pemkot Surabaya membangun sentra-sentra pedagang bagi pedagang kaki lima. Dengan dibangunnya tempat-tempat sentra kuliner ini Pemkot menginginkan pedagang non formal atau ilegal ini menjadi legal. Yang dapat diketahui letak persebaran sentra di setiap wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sentra PKL Surabaya Tahun 2017

No	Wilayah	Kapasitas	Pedagang Sentra Yang Aktif	Persentase
1	Wilayah Selatan	1.152	820	71%
2	Wilayah Pusat	1.471	1.009	69%
3	Wilayah Utara	1.308	847	65%
4	Wilayah Timur	1.461	987	67%
5	Wilayah Barat	997	715	72%
	Total seluruh wilayah	6.389	4.377	344%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Surabaya, diolah.

Dari data sentra PKL pada tabel 1.2 terdapat jumlah kapasitas penampungan pedagang sebesar 6.389 pedagang tetapi jumlah pedagang yang aktif berdagang di sentra hanya sebesar 4.377 pedagang. Dan jumlah stan yang masih kosong berjumlah 2.012 unit. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya minat para pedagang kaki lima untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor

Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Dan Keputusan Pemilihan Lokasi Berdagang (Studi Kasus Pedagang Non Sentra dan Sentra Kota Surabaya).

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima Kota Surabaya sebesar 7.541 pedagang (Dinas Koperasi dan Unit Mikro Kota Surabaya, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas diperoleh beberapa faktor yang dapat mengidentifikasi bahwa yang mempengaruhi pendapatan dan pemilihan lokasi berdagang pedagang non sentra dan sentra Kota Surabaya, yakni lama pendidikan, modal usaha, harga sewa kios dan jarak. Yang akan dituangkan dalam pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh lama pendidikan, modal usaha, harga sewa kios, jarak tempuh, lama berdagang, dan konsumen terhadap pendapatan pedagang non sentra dan sentra Kota Surabaya?
2. Bagaimana pengaruh lama pendidikan, modal usaha, harga sewa kios, jarak tempuh, lama berdagang, dan konsumen terhadap pemilihan lokasi pedagang non sentra dan sentra Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terlihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Dapat menganalisis pengaruh lama pendidikan, modal kerja, harga sewa kios, jarak tempuh, lama berdagang dan konsumen terhadap pendapatan pedagang pedagang non sentra dan sentra Kota Surabaya.

2. Dapat menganalisis pengaruh lama pendidikan, modal kerja, harga sewa kios, jarak tempuh, lama berdagang dan konsumen terhadap pemilihan lokasi berdagang

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan tujuan penelitian ini diharapkan dapat berguna, yaitu:

1. Sebagai masukan Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintahan Kota Surabaya dan Dinas ataupun Instansi yang terkait dalam penanganan pedagang non sentra dan sentra kuliner Kota Surabaya.
2. Agar dapat dipergunakan dalam pertimbangan Pemkot dalam pengembangan sentra kuliner, agar pedagang non sentra yang berada dipinggir jalan mau menempati sentra kuliner yang telah disediakan pemerintah kota.
3. Menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi.

1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan ini sistematika yang digunakan adalah:

Bab I : Pendahuluan, dimana menjelaskan mengenai latar belakang studi yang akan dilakukan mengenai sektor informal yakni pedagang non sentra dan sentra kuliner, permasalahan, tujuan penelitian, batasan permasalahan dan sistematis penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisikan teori dan kajian yang berhubungan dengan topik bahasan antara teori pendapatan; teori pemilihan lokasi; pengertian sektor informal dan pedagang kaki lima; ruang publik untuk kegiatan pedagang kaki lima; faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pemilihan lokasi berdagang; penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian, yang berisikan dari pendekatan penelitian, definisi operasionalisasi variabel; objek penelitian; jenis dan sumber data; populasi, total dan sebaran sampel penelitian; metode pengumpulan data; metode analisis data dimana metode analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua metode yaitu analisis regresi berganda dan analisis regresi logistik.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang topografi wilayah penelitian, hasil penelitian yang terdiri dari karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis regresi berganda dan analisis regresi logistik (*Logistik Regression Model*); pembahasan hasil analisis regresi berganda dan analisis regresi logistik.

Bab V : Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari pertanyaan penelitian.